

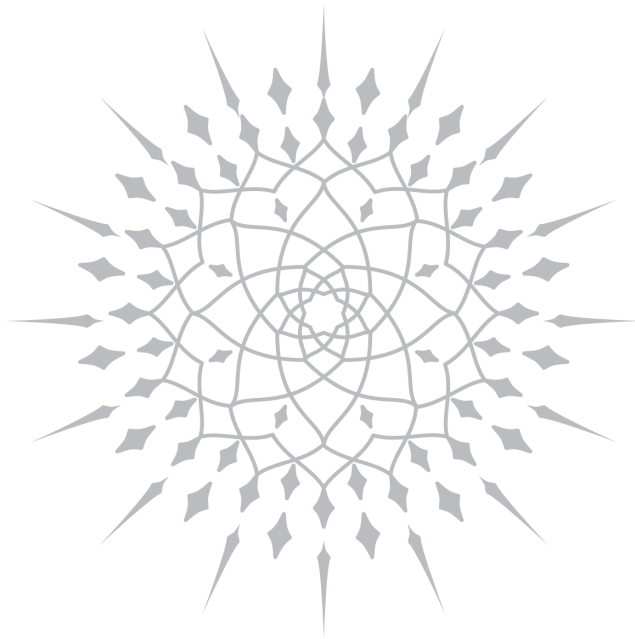
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





**Jurnal**  
**Pendidikan Islam**

---



# JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

## **Ketua Penyunting**

Imam Machali

## **Anggota Penyunting**

Sukiman, Sri Sumarni, Sabarudin, Karwadi, Na'imah,  
Zainal Arifin, Andi Prastowo, Sigit Prasetyo, Rohinah

## **Tata Usaha**

Siti Latifah, Sofa Faizin

## **Distribusi**

Maryono, Marwanto

Jurnal Pendidikan Islam (ISSN: 2301-9166) adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Himpunan Sarjana Pendidikan Islam (HiSPI). Jurnal ini mengkhususkan diri pada pengkajian ilmu pendidikan Islam. Pengelola menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, sarjana, professional, dan peneliti dalam disiplin ilmu pendidikan Islam untuk dipublikasikan dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili jurnal ini atau lembaga afiliasi penulisnya. Jurnal Pendidikan Islam (JPI) terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember.

Alamat Redaksi:

Jurnal Pendidikan Islam (JPI)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. III Ruang 315 UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Telp. +62-274-513056

E-mail: [jurnaljpi@yahoo.co.id](mailto:jurnaljpi@yahoo.co.id)

Website: [www.journal.uin-suka.ac.id](http://www.journal.uin-suka.ac.id)

## **DAFTAR ISI**

<b>RE-INTERPRETASI HADIS TARBAWI TENTANG KEBOLEHAN MEMUKUL ANAK DIDIK</b>	
ALI IMRON	141
<b>MENANGKAL RADIKALISME AGAMA DI SEKOLAH</b>	
ABDUL MUNIP	159
<b>TAHAP-TAHAP PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMIKIRAN KI AGENG SURYOMENTARAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN AKHLAK ISLAM</b>	
SUMEDI	183
<b>PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DALAM NOVEL DAN DAMAI DI BUMI! KARYA KARL MAY</b>	
INDRIYANI MA'RIFAH	203
<b>PENINGKATAN MUTU MADRASAH MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	
K.A.RAHMAN	227
<b>REINVENTING NILAI-NILAI ISLAM, BUDAYA, DAN PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER</b>	
MUKHIBAT	247
<b>LOGOTERAPI, SEBUAH UPAYA PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS DAN MAKNA HIDUP DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM</b>	
SUYADI	267

<b>INDEKS SUBJEK</b>	<b>281</b>
<b>INDEKS PENULIS</b>	<b>294</b>

# REINVENTING NILAI-NILAI ISLAM, BUDAYA, DAN PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

**Mukhibat**

STAIN Ponorogo

*e-mail: Mukhibat@yahoo.co.id*

## ***Abstract***

*Education is the process of transforming the values in the context of the establishment of private individuals who are able to make sense of themselves, society, and nation. The values that are instilled in the person are extracted from the students' identity and the identity of the national noble. Cirebon culture is one of cultural treasures owned by the nation. The combination of these two values is a typical characteristic of those found in the body of Cirebon culture. Education that is based on Cirebon culture is not stiff in racing the currents of modernity and the fast, and rapid globalization.*

***Keywords:*** Education, Culture Cirebon

## **Abstrak**

Pendidikan adalah proses transformasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan pribadi individu yang mampu memaknai dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Nilai-nilai yang hendak ditanamkan dalam pribadi anak didik digali dari jati diri dan identitas luhur bangsa. Budaya Cirebon adalah salah satu di antara sekian banyak khazanah kebudayaan yang dimiliki oleh Nusantara. Perpaduan dua nilai ini merupakan karakteristik khas yang ditemukan dalam batang tubuh kebudayaan Cirebon. Pendidikan berbasis budaya Cirebon, tidak kaku dalam mengarungi arus modernitas dan globalisasi yang cepat dan pesat.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Budaya Cirebon

## Pendahuluan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengawali kerjanya sebagai kepala pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di Republik ini dengan menyatakan “bahwa kita harus menjaga jati diri kita, ke-Indonesiaan kita. Hal yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia adalah budaya kita, *way of life* kita dan ke-Indonesiaan kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus kita jaga, kita pupuk, kita suburkan di hati sanubari kita dan di hati anak-anak kita”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden ingin mengangkat persoalan karakter bangsa dalam dinamika pembangunan nasional. Itulah sebabnya pada tanggal 14 Januari 2010, dalam sarasehan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional telah dideklarasikan “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional<sup>1</sup>. Mengapa Presiden dan Kementerian Pendidikan Nasional mengangkat persoalan karakter bangsa? Itu bukan sebuah basa-basi, tetapi terkait dengan realitas kehidupan masyarakat dan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia saat ini. Maraknya kenakalan dan perkelahian antar pelajar, pergaulan bebas<sup>2</sup>, peningkatan jumlah penggunaan narkoba, yaitu sebesar 22,7%, dari 1,1 juta ditahun 2006 menjadi 1,35 juta tahun 2008. Dari 3,6 juta penyalahgunaan narkoba 41 % mencoba di usia 16 sd 18 tahun<sup>3</sup>. Konflik horisontal, lalu lintas di jalanan tidak tertib, luntarnya etika dan budi pekerti, korupsi, dan semua itu sangat cukup sebagai argumen atas keprihatinan bersama tentang merosotnya budi pekerti dan lemahnya kemandirian serta jati diri bangsa.

Krisis akhlak dan moral tersebut mengingatkan kepada sebuah kritik sosial yang sangat tajam yang dilontarkan seorang pujangga dari Kraton Surakarta, R.Ng. Ranggawarsita terhadap realitas sosial, sekitar, 140-an tahun yang lalu melalui “Serat Kalatida”. Dalam serat ini antara lain dijelaskan adanya istilah “zaman edan”. Bahkan menariknya, istilah “zaman edan” ini semakin populer di kalangan masyarakat pada era modern sekarang ini<sup>4</sup>. Istilah tersebut dipandang sangat cocok dengan perkembangan sekarang ini yang ditandai dengan kemerosotan akhlak,

<sup>1</sup> Muhammad Nuh, “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” dalam *Kompas* edisi Sabtu, 20 Februari 2010.

<sup>2</sup> Situs resmi BKKBN tahun 2008 melaporkan, sebanyak 63% remaja pada usia SMP dan SMA pernah berhubungan seks di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi.

<sup>3</sup> Laporan Badan Nasional Penanggulangan Narkotika tahun 2008

<sup>4</sup> Baca Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1999), hlm. 189.



aspek moralitas, dan etika kesantunan, tindak kekerasan, serta lemahnya jati diri bangsa.

Berdasarkan atas kondisi moral bangsa yang demikian, munculah wacana akademik mengenai pendidikan karakter. Sekarang ini telah tumbuh kesadaran betapa mendesaknya agenda untuk melakukan terobosan guna membentuk dan membina karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sejumlah ahli pendidikan mencoba untuk merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan karakter, dan sebagiannya lagi bahkan sudah melangkah jauh dengan mempraktekannya.

Namun demikian, masih perlu lebih jauh, apa sesungguhnya isi dan proses yang hendak dijalankan oleh pendidikan karakter bangsa ini. Bagaimana karakter sebagai sebuah kebajikan (*virtue*) dipahami, nilai-nilai moral manakah yang ingin diajarkan dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia, sehingga dianggap sebagai nilai moral yang otentik bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia sejak dulu mempunyai nilai agama, nilai budaya, dan nilai Pancasila.

Dari sekian banyak wacana pendidikan karakter, menurut hemat penulis, konsep pendidikan karakter sekarang belum sepenuhnya mampu memberikan jawaban atas pertanyaan di atas. Boleh jadi, bagi para pelaku atau praktisi pendidikan karakter, pertanyaan-pertanyaan di atas tidak penting untuk dicari jawabannya karena tidak memberi solusi praktis terhadap problem pendidikan. Tulisan ini mencoba untuk ikut urun rembug dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dengan melakukan *reinventing* atau penggalian kembali nilai-nilai manakah yang sebenarnya dijadikan sumber dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa Indonesia, sehingga akan ditemukan nilai pendidikan karakter yang khas bangsa Indonesia.

## **Pendidikan Karakter**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".<sup>5</sup> Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia

<sup>5</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 7

yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional harus menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Istilah pendidikan karakter berasal dari dua kata “pendidikan” dan “karakter”. Dari sudut pandang filsafat, pendidikan akan terkait dengan filsafat pendidikan, sedangkan karakter menjadi bagian dari filsafat moral atau etika. Oleh karena itu sebenarnya konsep pendidikan karakter dapat ditinjau dari filsafat pendidikan dan filsafat moral yang melandasinya.

Secara konseptual, istilah pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral atau pendidikan nilai<sup>6</sup>. Karakter secara etimologis menurut Mounier berasal dari bahasa Yunani “kasairo” berarti “cetak biru”, “format dasar”, “sidik” seperti sidik jari. Menurutnya dalam pengertian karakter mengandung dua interpretasi, *pertama* karakter adalah *given* atau sesuatu yang sudah dari sananya, *kedua* suatu yang dibentuk melalui proses yang dikehendaki (*willed*).<sup>7</sup> Interpretasi kedua menyiratkan bahwa karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Istilah karakter juga merujuk pada ciri khas, perilaku khas seseorang atau kelompok, kekuatan moral, atau reputasi<sup>8</sup>. Karakter juga dipahami sebagai seperangkat ciri perilaku yang melekat pada diri seseorang yang menggambarkan tentang keberadaan dirinya kepada orang lain. Penggambaran itu tercermin dalam perilaku ketika melaksanakan berbagai aktivitas apakah secara efektif melaksanakan dengan jujur atau sebaliknya, apakah dapat mematuhi hukum yang berlaku atau tidak<sup>9</sup>.

Adapun pendidikan karakter bagi Doni Koesoema adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri<sup>10</sup>. Bagi Doni pendidikan karakter harus bersifat membebaskan. Alasannya, hanya dalam kebebasannya individu “dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas

<sup>6</sup> Samsuri, “Mengapa Perlu Pendidikan Karakter”. *Makalah*, disajikan pada *workshop* tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta tahun 2009. Dan Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

<sup>7</sup> Emmanuel Mounier, *The Character of Man*, (New York: Harper dan Brothers, 1956), hlm. 28.

<sup>8</sup> Thomas Lickona, *Education for Character Education: how Our School Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam), 1991), hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>10</sup> A. Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 194.

pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka”<sup>11</sup>.

Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter juga senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik<sup>12</sup>. Objek pendidikan karakter adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut didapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui, yang membutuhkan waktu sehingga terbentuklah pekerti yang baik sesuai dengan nilai yang ditanamkan<sup>13</sup>.

Pengembangan pendidikan karakter, harus dilakukan secara komprehensif oleh pendidik dengan bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. Bahkan, menurut Cletus R. Bulach<sup>14</sup> pendidik dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: *respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline*.

Thomas Lickona<sup>15</sup> menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Pendidikan karakter bukan sekadar memiliki dimensi integratif, dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan, sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadi-pribadi yang cendekia, mandiri dan bernurani, tetapi juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial.

Terkait dengan ini Wayan Lasmawan<sup>16</sup> menjelaskan adanya tiga kompetensi yang wajib dikembangkan dalam pendidikan karakter, yakni kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi intelektual.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Kirsten Lewis, “Character Education Manifesto”, *News*, (Boston University, 1996), p. 8

<sup>13</sup> Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 38.

<sup>14</sup> Cletus R. Bulach, “Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior”, *ProQuest Education Journal*, (Dec.2002), 80, <http://www.jstor.org/pss/30189797>, [22 Juni 2011].

<sup>15</sup> Thomas Lickona, “Talks About Character Education”, wawancara oleh Early Childhood Today, *Pro Quest Education Journal*, (April, 2000), 48, <http://webcache.googleusercontent.com>, diunduh, 20 April 2010.

<sup>16</sup> Wayan Lasmawan, “Merekonstruksi Mata Pelajaran Berdasarkan Paradigma Teknohumanistik”, *Makalah*, pada Seminar Pendidikan yang di FIS Undiksa, 30 Oktober, 2009.

1. **Kompetensi personal** merupakan kemampuan dasar yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian diri peserta didik sebagai makhluk individu yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Orientasi dasar pembentukan dan pengembangan kompetensi personal ini ditekankan pada upaya pengenalan diri dan pembangunan kesadaran diri peserta didik sebagai pribadi/individu dengan segala potensi, keunikan dan keutuhan pribadinya yang dinamis. Sejumlah kompetensi yang personal ke-Islaman-an yang perlu dikembangkan misalnya, pembentukan konsep dan pengertian diri, sikap objektif terhadap diri sendiri, aktualisasi diri, kreativitas diri, kemandirian itu sendiri, termasuk bagaimana menumbuhkembangkan budi pekerti luhur, disiplin dan kerja keras serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, sehingga perlu menumbuhkembangkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya.
2. **Kompetensi sosial** adalah kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Sejumlah kompetensi dasar yang dikembangkan adalah kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat sehingga perlu saling menghormati dan menghargai; pemahaman dan kesadaran atas kesantunan hidup bermasyarakat dan berbangsa; kemampuan berkomunikasi dan kerja sama antara sesama; sikap pro-sosial atau altruisme; kemampuan dan kepedulian sosial termasuk lingkungan; memperkokoh semangat kebangsaan, pemahaman tentang perbedaan dan kesederajatan dalam.
3. **Kompetensi intelektual**, merupakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang bersifat fisik, sosial, psikologis, yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain. Kemampuan dasar intelektual ini berkaitan dengan pengembangan jati diri para peserta didik sebagai makhluk berpikir yang daya pikirnya untuk menerima dan memproses serta membangun pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakannya baik dalam kehidupan personal maupun sosialnya. Kemampuan mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan masalah sosial dan memecahkan masalah itu sebagai ciri penting dalam kemampuan berpikir.

Ketiga kompetensi dengan berbagai nilai yang terkandung di dalamnya itulah yang harus dibangun melalui pembelajaran, sehingga melahirkan pelaku-pelaku sosial yang mumpuni. Para pelaku sosial itu harus dapat membangun sikap dan perilaku dengan berbagai dimensinya, memahami hak dan kewajibannya, kemudian memiliki kepekaan untuk memahami, menyikapi dan ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan yang ada<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Beberapa masalah sosio-kebangsaan sebagaimana sudah disinggung di muka seperti: berbagai

## Kebenaran Nilai Moral: Antara Relativism Moral dan Absolute Moral

Pemaknaan pendidikan karakter seperti di atas, telah memposisikan pendidikan karakter menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial<sup>18</sup>. Namun demikian hal penting yang dipertanyakan adalah nilai-nilai moral manakah yang ingin dikembangkan dalam pendidikan karakter?. Sehingga akan diketahui secara pasti karakter seperti apa yang ingin dibentuk di Indonesia ini. Sebagaimana dipahami bahwa bangsa Indonesia mempunyai beberapa sumber nilai, seperti nilai agama, budaya, dan nilai Pancasila. Pertanyaan demikian membawa perdebatan pada wilayah etika normatif yakni prinsip dan norma moral manakah yang dapat dijadikan acuan bagi penilaian dan putusan moral.

Terhadap masalah ini ada dua kelompok pendapat yang berbeda. Satu kelompok berpendapat bahwa kebenaran moral itu relatif (*moral relativism*). Moral baik dan buruk tergantung pada bagaimana individu mendefinisikan. Berdasar teori ini, prinsip moral baik yang berasal dari agama, budaya, dan Pancasila bukan suatu yang *innate*, alami atau mengandung keabadian tetapi sesuatu yang dikonstruksikan oleh lingkungan sosial. Bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial, maka nilai-nilai yang dianut juga beragam sehingga tidak berlaku adanya kebenaran nilai yang berkaku absolut. Nilai dianggap benar tergantung dari siapa yang mendefinisikan “*whose is values*” (moral menurut siapa)<sup>19</sup>.

Kelompok lain berpendapat bahwa kebenaran moral bersifat absolut (*Absolute Moral*). Kelompok ini sangat percaya bahwa ada standar moral yang berlaku umum yakni standar yang berlaku absolute, universal, di mana agama dan budaya pasti mengakuinya. Seperti *care* (kasih sayang), *respect* (saling menghormati), *responsible* (bertanggung jawab), *integrity* (integritas), *harmony* (keseimbangan) adalah nilai moral universal yang absolute kebenarannya. Kelompok ini juga menganggap moral universal juga bersumber dari agama-agama yang ada yaitu prinsip *golden rule*<sup>20</sup>.

Dalam sejarah pendidikan karakter di Amerika Serikat, ditengarai bahwa paham *moral relativism* telah menjadi penyebab utama terjadinya dekadensi moral pada remaja Amerika di era tahun 1980-1990-an. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya perilaku seks bebas, pergaulan alkohol, obat terlarang dan

---

bentuk anarkhisme dan tindak kekerasan, perilaku amoral dan lunturnya budi pekerti, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakjujuran, budaya nerabas dan tidak disiplin, semau gue dan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, sampai pada merosotnya rasa ke-Indonesiaan.

<sup>18</sup> Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak Bangsa, di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116.

<sup>19</sup> Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004), hlm. 98.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

pelecehan agama. Standar moral warga Amerika menjadi luntur dikarenakan anak tidak mengetahui mana moral yang baik dan moral yang buruk.

Kegagalan pendidikan moral pada masa itu disebut oleh Thomas Lickona dalam *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility* sebagai “*The declined of character education*”. Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurutnya, disebabkan oleh munculnya pandangan-pandangan filosofis sebagai berikut:

1. Darwinisme yang menyatakan bahwa evolusi terjadi pada semua hal termasuk nilai. Nilai dianggapnya sebagai benda (*thing*). Nilai tidaklah tetap, selalu berkembang dan fluktuatif.
2. Personalisme yang menyatakan setiap orang seharusnya bebas untuk memilih nilai-nilai. Orang lain tidak berhak menentukan apa yang menjadi nilai seseorang.
3. Pluralisme yang berpandangan bahwa nilai-nilai itu beragam sesuai dengan keragaman kelompok-kelompok di masyarakat. Ini memunculkan pertanyaan mengenai pendidikan karakter, yakni nilai-nilai siapakah yang seharusnya diajarkan (*Whose values should we teach?*).
4. Paham sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan publik. Pendidikan karakter dicurigai bahkan ditakutkan akan mengajarkan moralitas agama ke dalam ranah publik (sekolah).

Mengantisipasi akan gejala ini maka mulai tahun 1990-an, gerakan pendidikan karakter mulai dikembangkan kembali namun dalam gagasan yang baru. Thomas Lickona menyebutnya sebagai “*The Return of Character Education*”<sup>21</sup>. Masyarakat Amerika dan orang dewasa mengakui bahwa anak muda membutuhkan pengarahannya moral, bukan lagi diberi kebebasan memilih moral. Orang tua dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk menentukan nilai-nilai kebaikan (*good values*) dan membantu membentuk karakter mereka berdasarkan nilai-nilai kebaikan tersebut.

Apa yang telah terjadi di Amerika Serikat, hendaknya menjadikan renungan yang mendalam bagi bangsa Indonesia, walaupun Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah yang berbeda. Karakter yang baik tidak hanya kemampuan memberi penalaran moral, mampu mengajukan pertimbangan moral serta memberi alasan pembenaran yang kesemua itu masih terbatas pada dimensi pengetahuan moral. Pendidikan karakter merupakan petunjuk (*directive*) dari pada kebebasan memilih (*non directive*), pendidik, orang tua berhak menentukan nilai-nilai apa yang seharusnya. Sekolah perlu membantu anak untuk memahami, memperhatikan dan bertindak berdasar nilai-nilai itu di dalam kehidupannya.

<sup>21</sup> Thomas Lickona, “*The Return of Character Education*”, dalam *Jurnal Education Leadership*, Vol 51 No. 3 November 19973, hlm. 6.

Thomas Lickona<sup>22</sup> menyebut bahwa karakter yang baik meliputi tiga bagian yakni:

1. “*Knowing the good*. Untuk membentuk karakter, anak tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal tersebut. “Selama ini banyak orang yang tahu bahwa ini baik dan itu buruk, namun mereka tidak tahu alasannya apa dan masih terus melakukan hal-hal yang tidak baik, jadi masih ada gap antara *knowing* dan *acting*,”
2. “*Feeling the good*”. Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Disini anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. “Jika *Feeling the good* itu sudah tertanam, itu akan menjadi “*engine*” atau kekuatan luar biasa dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengerem dirinya agar terhindar dari perbuatan negative”.
3. Yang coba ditumbuhkan adalah “*Acting the good*”. Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa melakukan, apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang, tidak akan ada artinya. Jadi, selama ini di sekolah, anak tidak dilatih untuk melakukan hal-hal yang baik. “Selama ini hanya himbauan-himbau saja. Sementara, melakukan sesuatu yang baik itu harus dilatih, sehingga hal tersebut akan menjadi bagian dari kehidupan mereka”.

Pada intinya bentuk karakter apa pun yang dirumuskan tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai universal. Oleh karena itu, pendidikan yang mengembangkan karakter adalah bentuk pendidikan yang bisa membantu mengembangkan sikap etika, moral dan tanggung jawab, memberikan kasih sayang kepada anak didik dengan menunjukkan dan mengajarkan karakter yang bagus. Hal itu merupakan usaha intensional dan proaktif dari sekolah, masyarakat dan negara.

## **Reinventing Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa**

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa, pendidikan karakter telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan menjadi salah satu langkah menyembuhkan penyakit sosial. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini, secara tidak langsung memunculkan anggapan ketidakpercayaan terhadap peran pendidikan Islam untuk mencegah adanya berbagai penyakit sosial. Dan apakah pendidikan Islam belum dianggap menjadi sumber nilai dalam membentuk karakter bangsa? Pertanyaannya lagi, apakah ada yang salah dalam praktek pendidikan Islam selama

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 11

ini. Masuknya ranah pendidikan Islam dalam pemerintahan (publik) seharusnya menciptakan harapan baru bagi umat Islam untuk lebih mewarnai nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain sebagai sarana *tafaqquh fi al-din* juga sebagai *tarbiyatul khuluq* bangsa Indonesia. Islam sebagai suatu agama, secara sungguh telah mendorong manusia untuk berusaha melalui pribadi dan kelompoknya agar dapat menciptakan suatu keadaan yang lebih baik, sehingga menjadi sesuatu kekuatan dunia<sup>23</sup>.

Kebijakan adanya pendidikan karakter memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi guru-guru pendidikan Islam untuk lebih memutakhirkan pembelajarannya sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sebenarnya dalam Pendidikan Islam mempunyai istilah-istilah yang tepat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran berkarakter, yaitu: *tilâwah*, *ta'lim*, *tarbiyah*, *ta'dib*, *tazkiyah* dan *tadlrib*. *tilâwah* menyangkut kemampuan membaca; *ta'lim* terkait dengan pengembangan kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*); *tarbiyah* menyangkut kepedulian dan kasih sayang secara naluriah yang didalamnya ada asah, asih dan asuh; *ta'dib* terkait dengan pengembangan kecerdasan emosional (*emotional quotient*); *tazkiyah* terkait dengan pengembangan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*); dan *tadlrib* terkait dengan kecerdasan fisik atau keterampilan (*physical quotient* atau *adversity quotient*).

Gambaran mengenai pendidikan karakter di Indonesia sekarang ini setidaknya dapat dilihat dari dua naskah yakni Rencana Induk Pendidikan Karakter Bangsa Terbitan Pemerintah Republik Indonesia (2010) dan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa terbitan Pusat Kurikulum, Kemendiknas (2010). Berdasarkan buku tersebut nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut:

1. *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
2. *Pancasila*: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan

<sup>23</sup> Muhammad Marmaduke Picktchall, *Kebudayaan Islam*, (Surabaya: PT Bungkul Indah, 1993), hlm.7.



budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. *Budaya*: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.<sup>24</sup>

Pertanyaannya kemudian adalah, faham apakah yang dianut, *relativism moral* ataukah *absolute moral* dalam mengembangkan nilai-nilai di atas?. Sumber nilai-nilai di atas, secara tidak langsung harus disepakati sebagai nilai bersama yang bisa dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Masuknya nilai-nilai di atas (agama, budaya, Pancasila) dalam tujuan pendidikan nasional sebagai sumber pendidikan karakter, masih perlu dinyatakan secara jelas oleh karena sebagai sistem nasional, apapun jenis pendidikan di negara Indonesia, acuan secara yuridis sudah sendirinya adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Maka tidaklah berlebihan kalau pemerintah juga mengontrol terhadap nilai moral yang dikembangkan oleh semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia khususnya pendidikan keagamaan. Argumen yang bisa dikemukakan adalah munculnya sejumlah gerakan militanisme, radikalisme, terorisme yang terus mendera negeri dan semua perilaku yang menunjukkan rendahnya moral yang disebabkan keliru dalam mengambil dan memahami nilai. Akan tetapi juga jangan sampai terjadi indoktrinasi sebuah nilai seperti yang telah terjadi pada Pancasila pada masa Orde Baru.

Mengutip pendapatnya William Kymlicka dalam Felix Baghi<sup>25</sup> sumber suatu karakter atau jati diri bangsa di manapun umumnya ada tiga yakni asal usul etnis, iman religius dan gagasan mengenai kebaikan bersama. Asal usul etnis dalam hal ini budaya, iman religius dalam hal ini agama dan kebaikan bersama dalam hal ini adalah Pancasila sebagai gagasan sosial politik. Nilai-nilai tersebut diangkat menjadi sumber nilai yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai dalam tujuan pendidikan nasional pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang diangkat dari ketiga sumber tersebut.

<sup>24</sup> Kemendiknas RI, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: Balitbang Puskur Kemendiknas RI, 2010), hlm. 14.

<sup>25</sup> Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*, (Maumere: Ledarero, 2009), hlm. 261.

Nilai-nilai dalam tujuan pendidikan suatu saat akan berganti jika ada perubahan perundangan, sementara nilai dan tiga sumber sebelumnya relative tetap.

Diangkatnya nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional sebagai sumber pendidikan karakter, menunjukkan diakuinya gagasan mengenai *absolute moral* dalam arti nilai yang disepakati dan penting. Nilai tersebut baik secara politis maupun yuridis memang telah menjadi kesepakatan bangsa. Namun demikian nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara sosiologis belum tentu dijadikan sebagai sumber dari pendidikan karakter bagi sebagian kelompok masyarakat, oleh karena itu pelaku pendidikan karakter dapat saja mengandalkan sumber nilai lain seperti agama dan budaya. Menurutnya Pancasila baik sebagai konsep politik maupun akademis sampai sekarang selalu menghasilkan keragaman pemikiran.

Gagasan yang mirip dengan *relativism moral* nampak juga dalam kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan “sekolah dan guru dapat menambah ataupun mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah dan hakekat dari SK/KD dan materi bahasan suatu mata pelajaran”<sup>26</sup>. Namun demikian perlu dipertanyakan apakah para pelaku pendidikan karakter memiliki kesadaran bahwa pernyataan di atas diartikan untuk bebas saja menentukan nilai-nilai karakter dan itu memang relatif menurut mereka atautkah pernyataan tersebut diartikan untuk bebas saja menentukan nilai-nilai karakter dan itu memang relatif menurut mereka atautkah pernyataan tersebut dimaksudkan boleh menentukan nilai-nilai karakter baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana peserta didik belajar. Pernyataan demikian penting untuk diketahui oleh karena gagasan *relativism moral* berasal dari kemajuan ilmu-ilmu sosial seperti Antropologi, Etnologi, Sosiologi, dan Sejarah serta kemajuan teknologi informasi yang telah berkontribusi besar dalam mengembangkan pemahaman tentang perbedaan-perbedaan cara berpikir, bersikap berperilaku kelompok bangsa atau masyarakat. Pemahaman seperti ini melahirkan pandangan pluralisme budaya, sikap toleransi terhadap perbedaan nilai bahkan pandangan bahwa moral itu relatif tergantung pada masyarakatnya<sup>27</sup>.

Keragaman budaya dan masyarakat Indonesia tampaknya diakui dan diadopsi dalam pendidikan karakter Indonesia. Di mana nilai-nilai budaya bangsa dapat dimasukkan sebagai isi pembelajaran. Hal demikian tercermin dalam pernyataan bahwa salah satu sumber nilai dalam pendidikan karakter adalah budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak

<sup>26</sup> Kemendiknas RI, *Pengembangan Pendidikan...*, hlm. 10.

<sup>27</sup> Sudarminta, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997), hlm. 13.

didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu<sup>28</sup>. Jika nilai-nilai budaya yang dijadikan isi pendidikan karakter di suatu sekolah itu adalah khas, unik, hanya berlaku, di wilayah tersebut bahkan mungkin bertentangan dengan nilai budaya di sekolah lain, maka bisa disebut sebagai nilai-nilai partikular yang sifatnya relatif.

Sumber nilai yang lain adalah agama oleh karena diakui secara luas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama dan ajaran agama menjadi dasar bagi kehidupan<sup>29</sup>. Bahwa moralitas yang berdasarkan agama telah diakui banyak pihak bahkan ada yang secara apriori menyatakan moralitas harus dan tidak bisa tidak berlandaskan pada ajaran agama. Namun demikian hal ini bisa muncul perdebatan, jika moralitas itu berdasarkan ajaran agama, ajaran agama manakah yang dijadikan sebagai pilihan, sementara agama itu sendiri bermacam-macam berikut dengan ajarannya dan pilihan moralitas yang harus diambil berlaku umum bagi semua tanpa melihat perbedaan agama. Masalah ini mungkin tidak menjadi masalah bagi sekolah-sekolah khusus (agama) tetapi bermasalah pada sekolah-sekolah publik. Meskipun nilai moral agama diakui benar dan *absolute* bagi para pemeluknya tetapi belum tentu diakui benar oleh pemeluk agama lain. Jika hal ini terjadi maka moralitas yang bersumber dari agama menjadi hal yang partikular dan relatif.

Antara ketiga sumber nilai tersebut itu, yakni agama, budaya dan gagasan sosial politik Pancasila, bisa dirasakan bahwa nilai ajaran agamalah yang paling kuat menghujam atau terpatri dalam diri seseorang, oleh karena ajaran agama tidak hanya menjangkau masa kini tetapi mampu memberikan keyakinan akan hari kemudian. Hal ini menjadi kelebihan bagi pendidikan karakter yang berbasis nilai agama. Nilai budaya juga tidak bisa diremehkan oleh karena pasti akan muncul para pendukung budaya tertentu yang berusaha dengan gigihnya memasukkannya sebagai isi pendidikan karakter. Nilai tradisi biasanya dipegang teguh oleh para pewaris kebudayaan. Dua sumber nilai ini meskipun dianggap *absolute moral* oleh pendukungnya, namun keberlakuannya secara umum dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sulit untuk dipaksakan. Secara internal ia bersifat *absolute values*, secara eksternal ia bersifat *relative values*.

Nilai-nilai Pancasila menjadi yang paling lemah keberlangsungannya kecuali melalui proses intervensi dengan perangkat hukum dan kebijakan politis lainnya. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa. Bangsa Indonesia sudah ber-Pancasila sebelum Indonesia merdeka yakni Pancasila dalam kebudayaan dan Pancasila dalam religius, setelah itu Pancasila dalam Negara atau dikenal dengan istilah Pancasila dalam tri-prakara<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Kemendikbud RI, *Pengembangan Pendidikan*, hlm. 8.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Notonegoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1980), hlm. 17.

Nilai-nilai Pancasila sekarang ini adalah nilai-nilai Pancasila sebagai gagasan sosial politik bangsa Indonesia dalam bernegara. Dibandingkan dengan dua nilai sebelumnya, nilai Pancasila lebih bersifat konsensus nilai, nilai etik bersama dan menjadi integrasi nilai. Namun nilai Pancasila tidak sekuat nilai agama dan budaya dalam menyakinkan individu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih menyakinkan individu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih merupakan sebuah identitas yang dikonstruksikan guna membangun keberlangsungan bangsa.

Manakah yang harus diutamakan dari ketiga nilai tersebut dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing? Thomas Lickona menyatakan negara yang mengakui agama, maka pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan agama dan sekolah agama, sedang negara yang tidak mengakui agama, pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan (*civics*). Pernyataan ini dapat diartikan bahwa di negara non sekuler nilai moral agama menjadi basis pendidikan karakter, sedangkan di negara-negara sekuler yang umumnya ada di Barat, menggunakan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana bagi pendidikan moral yang sumber nilainya berasal dari gagasan-gagasan sosial politik sekuler, tidak ada kaitannya dengan agama dan hal itu dilakukan di sekolah publik. Paham sekularisme dianggap mampu menyelesaikan konflik hubungan agama dan negara, termasuk dengan memisahkan secara tegas antara sekolah agama dengan sekolah publik.

Berkaitan dengan Indonesia, tidak mungkin bisa dilakukan. Indonesia adalah Negara bukan sekuler dan bukan pula Negara agama. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dari sisi agama dan kebudayaan. Pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan praktis tidak ada masalah jika nilai-nilai moral agama menjadi dasar dalam pendidikan karakter. Lain halnya pada lembaga pendidikan publik (negeri), nilai-nilai apakah yang sesuai yang akan dikembangkan bisa memunculkan problem tersendiri. Motto “Bhineka Tunggal Ika” menuntun pada bangsa Indonesia mengakui identitas kewarganegaraan yang terbedakan (*diferensiated citizenship*) dalam agama dan juga budaya. Namun demikian semua warga masyarakat Indonesia harus mendukung identitas kewarganegaraan nasional (*national citizenship*). Kondisi demikian menjadikan pendidikan karakter harus mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya dan juga nilai Pancasila. Untuk itu kemungkinan terjadinya pertentangan antar berbagai pihak mengenai pilihan nilai bisa saja terjadi. Sejarah panjang bangsa ini telah menunjukkan bahwa Indonesia sering terjadi konflik antara agama dan budaya. Bahkan saat ini masih dijumpai sebagian pemeluk agama dan pewaris budaya tertentu ingin memaksakan suatu nilai untuk diakui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaannya kemudian adalah nilai apa yang seharusnya dikembangkan dalam proses pendidikan sehingga akan menjadi nilai khas bangsa Indonesia dan juga akan melahirkan pendidikan karakter yang otentik bangsa Indonesia?. Terhadap masalah demikian Doni Koesoema menyarankan agar tidak terjadi pertentangan nilai dalam mengadopsi, sebaiknya pendidik menggunakan nilai sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila, ideologi negara Indonesia<sup>31</sup>. Dalam pandangan ini Pancasila diposisikan sebagai materi pendidikan karakter yang paling tepat di antara nilai-nilai yang lain. Hal ini disebabkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, sedangkan nilai agama tetap penting dipertahankan, namun tidak dapat dipakai dasar yang kokoh bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Pemahaman demikian bisa dimaklumi oleh karena nilai dalam Pancasila telah diakui sebagai nilai bersama, nilai Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat.

Bagaimana dengan nilai agama dan budaya? Tentunya semua pemeluk agama dan pewaris budaya tertentu tidak akan menerima apabila agama dan budaya mereka dinegasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa nilai agama dan budaya telah ada dan hidup dalam keyakinan masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila diletakkan sebagai dasar negara. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama justru semakin berkembang pesat seiring semakin meluasnya dekadensi moral para remaja Indonesia. Orang tua sekarang cenderung menyekolahkan anak-anaknya pada lembaga pendidikan agama dengan harapan anaknya akan terbentengi moralnya dari pengaruh negatif dampak globalisasi. Walaupun sebenarnya konsep pendidikan karakter Indonesia telah menempatkan nilai agama dan budaya di samping nilai Pancasila sebagai sumbernya. Bagi sebagian pendukung agama dan budaya tertentu akan mengatakan bahwa nilai moral Pancasila sendiri masih dianggap sebagai nilai yang *absurd* dan multi tafsir. Masih dipertanyakan apakah memang nilai moral Pancasila itu bisa diamalkan. Jika ada, apakah ada metode belajar menurut Pancasila, cara makan menurut Pancasila, dan sebagainya.

Kembali pada permasalahan awal perihal nilai yang dijadikan isi pendidikan karakter apakah dipahami sesuatu yang absolut atau relatif. Kalau dicermati dalam buku pedoman pendidikan karakter (kemendikbud 2010) tampaknya konsep pendidikan karakter Indonesia cenderung menempatkan nilai sebagai hal yang absolut, penting, dan perlu diberikan kepada peserta didik. Bagi bangsa Indonesia yang lebih memandang dirinya sebagai masyarakat komunal, nilai memang dipahami sebagai kekuatan spiritual dan emosional yang urgen yang mampu menggerakkan kehidupan ini. Nilai bukan semata-mata gejala alamiah, relatif maupun subyektif. Dalam masyarakat komunitarian sebuah kelompok bangsa

<sup>31</sup> Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter...*, hlm. 207.

berhak menentukan nilai-nilai apa yang layak dan sebaiknya diberikan kepada individu anggota komunitas tersebut. Menurut Will Kymlicka sebuah masyarakat komunitarian dapat dan seharusnya mendorong orang untuk menerima konsepsi-konsepsi tentang kehidupan yang baik yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakatnya<sup>32</sup>. Masyarakat Indonesia bisa menerima adanya pandangan hidup bersama sebagai sebuah konsep mendasar tentang kehidupan yang baik dalam hal ini Pancasila. Sementara itu pula masyarakat Indonesia bisa menerima pandangan hidup tiap komunitas yang berbeda, dalam hal ini agama dan budaya. Menurut penulis, gejala ini bukanlah *relativism moral* tetapi lebih merupakan pengakuan terhadap adanya pluralitas termasuk pluralitas moral.

Sementara, pluralisme di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Format pluralitas yang menguat lewat proses sejarah dengan berbagai dimensinya dipahami mempunyai keunikan jika dibanding dengan pluralitas di negara-negara lain. Atas dasar pluralitas itu, maka Indonesia tidak mengambil bentuk *negara agama* dan juga tidak mengambil bentuk *negara sekuler*. Indonesia membentuk negara sendiri sebagai *negara Pancasila* di mana negara tidak identik dengan agama tertentu tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Bagaimana negara terhadap agama bisa dilihat dalam UUD 1945 baik pada pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Sila pertama Pancasila dan bab XI UUD 1945 yang berjudul *agama* merupakan landasan konstitusinya. Penjelasan UUD 1945 menegaskan: Oleh karena Undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.<sup>33</sup>

Persoalannya sekarang adalah bagaimana memunculkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa inti pendidikan Islam adalah *tarbiyatul khuluk*, sehingga sebenarnya pelaksanaan pendidikan Islam sejak lahirnya Islam sampai sekarang seharusnya dalam rangka memperbaiki dan membentuk akhlak yang sesuai dengan ajaran-ajaran al-Qur`an dalam kerangka teologis-filosofis bukan hanya berhenti pada metafisis-filosofis. Realitas Maka, upaya untuk mengkaji kembali pelaksanaan pembelajaran PAI semakin mendesak apabila dikaitkan dengan kenyataan di lapangan yakni, seperti krisis akhlak yang ditandai banyaknya kejahatan, perkelahian antar pelajar, perilaku seks bebas dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang selalu meningkat setiap tahunnya.

<sup>32</sup> Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, terj. Agus Wahyudi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 276.

<sup>33</sup> Penjelasan UUD 1945, Bag. *Umum*, angka II. (4)

Berdasarkan hal-hal di atas tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pendidik muslim kecuali memutakhirkan pembelajarannya dengan memasukkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari ajaran Islam dalam kurikulum. Salah satu bentuk pemutakhiran pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islam dalam semua materi pendidikan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran metafisis-filosofis tetapi harus sudah pada *body of knowledge* yang dapat memberi gambaran yang utuh tentang nilai-nilai Islam dalam materi-materi pendidikan.

## Simpulan

Pendidikan karakter merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Nilai ideal yang dikembangkan dalam pendidikan karakter Indonesia mencakup nilai-nilai agama, budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari ketiga sumber tersebut berhasil diidentifikasi sejumlah nilai yang dianggap layak untuk dikembangkan dalam pendidikan karakter kepada peserta didik melalui proses intervensi dan habituasi yakni nilai kabajikan religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, patriotisme, cinta damai, peduli lingkungan sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter di Indonesia lebih mencerminkan paham *absolute* moral dari pada *relativism* moral. Paham absolute moral ini dapat dilihat pada diangkatnya nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter, sehingga nilai dalam Pancasila baik secara politis dan yuridis telah menjadi kesepakatan bersama. Adapun dua sumber nilai yang lain yakni agama dan budaya lebih berlaku paham pluralitas moral (bukan *relativism moral*), di mana pendidik dan praktisi pendidikan dapat mengurangi atau menambah nilai-nilai yang sejalan dengan masyarakat. Pendidikan karakter yang seperti di atas itulah yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang otentik atau khas pendidikan karakter Indonesia.

## Rujukan

- Bulach, Cletus R., "Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior", *ProQuest Education Journal*, (Dec.2002), 80, <http://www.jstor.org/pss/30189797>, [22 Juni 2011].
- Baghi, Felix, *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere: Ledarero, 2009.
- Kemendiknas RI, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Jakarta: Balitbang Puskur Kemendiknas RI, 2010.
- Koesoema, A. Doni, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010.

- Koesoema, Doni, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak Bangsa, di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Laporan Badan Nasional Penanggulangan Narkotika tahun 2008
- Lasmawan, Wayan, "Merekonstruksi Mata Pelajaran Berdasarkan Paradigma Teknohumanistik", *Makalah*, pada Seminar Pendidikan yang di FIS Undiksa, 30 Oktober, 2009.
- Lewis, Kirsten, "Character Education Manifesto", *News*, Boston University, 1996.
- Lickona, Thomas, "Talks About Character Education", wawancara oleh Early Childhood Today, *Pro Quest Education Journal*, April, 2000, <http://webcache.googleusercontent.com>, [20 April 2010].
- Lickona, Thomas, "*The Return of Character Education*", dalam *Jurnal Education Leadership*, Vol 51 No. 3 November 1973
- Lickona, Thomas, *Education for Character Education: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam, 1991.
- Megawangi, Ratna, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*, Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004.
- Mounier, Emmanuel, *The Character of Man*, New York: Harper dan Brothers, 1956.
- Notonegoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1980.
- Nuh, Muhammad, "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" dalam *Kompas* edisi Sabtu, 20 Februari 2010.
- Penejelasan UUD 1945, Bag. *Umum*, angka II. (4)
- Picktchall, Muhammad Marmaduke, *Kebudayaan Islam*, Surabaya: PT Bungkul Indah, 1993.
- Samsuri, "Mengapa Perlu Pendidikan Karakter". *Makalah*, disajikan pada workshop tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY, Yogyakarta tahun 2009.
- Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999.



Situs resmi BKKBN tahun 2008

Sudarminta, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 7

Zuchdi, Darmiyati, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zuriah, Nurul, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.



# INDEKS SUBJEK

## A

- 'abath 24  
'alamah 22  
'aql 24, 111  
'ayah 23  
A. Baiquni 115  
A. Hanafi 76  
Abd. Moqsih Ghazali 6  
Abdul Aziz 22, 30, 116, 119  
Abdul Hadi WM 28  
Abdul Karim Soroush 111  
Abdul Mujib 71, 74, 77  
Abdul Munir Mulkhan 22, 49, 50  
Abdul Qadir Abdul Aziz 116, 119  
Abdul Rachman Shaleh 129  
Abdullah Ahmad 125  
Abdullah Idi 90  
Abdur Rahman Assegaf 98  
Abdurrahman Wahid 11, 16, 95  
absolut 3, 14, 20  
absolute moral 257, 258, 259, 263, 286  
absurd 261, 286  
Abu Bakar Baasyir 173, 286  
Abu Daud 116  
Abu Muhammad Jibril 168, 286  
Abudin Nata 57  
Achmadi 124, 130, 135, 137  
Acting the good 255, 286  
Adam 23  
Aden Wijaya 132  
afektif 34, 36, 70, 72  
affirmative action 50, 51, 52  
Agama 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 28, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 67, 69, 72, 73, 74, 83, 86, 87, 98, 103, 105, 107, 109, 111, 119, 120, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137  
agama Kristen 211, 212, 286  
agresivitas 205, 286  
Agus Purwadi 107  
Agus Zaenul Fitri 34, 35, 36, 37, 39, 53  
Ahmad Syafi'i Ma'arif 2  
Ahmad Yusuf Sobri 41, 42, 44, 54  
Ahmadi 41, 53  
Ahmadiyah 164, 286  
Ahmadiyah 63  
ajaran agama 204, 256, 259, 286  
akhlak 154, 187, 188, 190, 196, 197, 234, 248, 250, 251, 262, 286  
Akhlak 64, 79, 86, 134  
aksiologi 106  
akulturasi 90  
al-'Ilm 115  
Al-Alaq 168, 286  
alat kodifikasi 204, 286  
Albert Einstein 107  
Alef Theria Wasim 3, 9, 17  
al-Farabi 27  
al-Ghazali 21, 27, 130  
al-Hadis 74, 99, 100, 101  
Ali Ashraf 25  
Ali Ghufron 3  
Ali ibn Abi Thalib 163, 286  
Ali Maksum 58  
aliran Stoik 286  
al-Iraqi 27  
al-Khulafa' al-Rasyidun 163, 286  
al-Qowam 168, 286  
Al-Qur'an 6, 7, 9, 16, 17, 23, 34, 64, 87, 99, 100, 101, 131, 133  
Al-Quran 162, 175, 177, 178, 235, 240, 246, 286  
al-Razi 27  
altruistik 106  
al-wala wa al-bara' 167, 286  
amar makruf 160, 161, 286  
Ambon 164, 204, 286

- Ambon 56  
 Amerika Serikat 33, 57, 93, 94  
 Amri 41, 53  
 Amrullah Ahmad 21  
 anak 142, 143, 146, 147, 145, 148, 144,  
 149, 150, 151, 152, 154, 155, 169,  
 170, 171, 176, 179, 184, 191, 193,  
 195, 198, 214, 216, 217, 218, 222,  
 234, 235, 239, 242, 247, 248, 254,  
 255, 261, 277, 286  
 anak didik 143, 149, 150, 154, 155, 179,  
 234, 247, 255, 286  
 Anas bin Malik 150, 151, 152, 286  
 An-Nihayah wal Khulashoh 169, 286  
 anti diskriminasi 215, 286  
 Antropologis pedagogis 286  
 antropomorfis 21  
 Apokaliptisisme 3, 17  
 Aqwam 168, 286  
 Arab badui 153, 154, 286  
 Arabia 163, 178, 286  
 Arafah 168, 286  
 Ariel Haryanto 37  
 arif 141, 148, 154, 155, 156, 206, 223,  
 286  
 aristotelian 286  
 Armahedi Mahzar 113  
 Ary Ginanjar Agustian 110  
 As'ad Said Ali 5  
 ASEAN 32, 40  
 asimilasi 90  
 Augras dan Stainciu 119  
 Azyumardi Azra 162, 165, 180, 286
- B**
- Ba'asyir 168, 286  
 bahasa 161, 168, 171, 196, 204, 205, 206,  
 208, 210, 213, 214, 217, 222, 241,  
 250, 286  
 bahasa Arab 26, 147  
 bahasa Persia 26  
 Bahrudin 32, 53  
 Bahtiar Effendi 98  
 Bali 2, 3, 63  
 baligh 146, 286  
 Bambang Bimo Suryono 86  
 Bangsa Indonesia 205, 253, 259, 286
- Banks & Banks 93  
 Barack Husain Obama 93  
 Barat 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 94,  
 113, 114, 117, 123, 127, 129, 130,  
 131, 133, 134  
 Barthes 286  
 behind the fact 19, 24  
 Belanda 123, 124, 125, 126, 129  
 bentuk bahasa 213, 286  
 Bhineka Tunggal Ika 260, 286  
 Bhineka Tunggal Ika 3, 4, 92  
 bid'ah 162, 163, 286  
 block-grant 42, 51  
 Bloom 70  
 Bowles 38, 39  
 brainwashing 165, 286  
 budaya 162, 163, 179, 186, 206, 207, 211,  
 229, 231, 233, 236, 237, 238, 239,  
 245, 247, 248, 249, 250, 253, 256,  
 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,  
 267, 269, 286  
 Budaya 4, 16  
 budaya asing 90, 101  
 budaya lokal 90, 95, 96, 101  
 budaya maya 90  
 budayawan 114  
 Bukhari Umar 57
- C**
- California Institute of Technology (CIT)  
 107  
 catatan 170, 171, 180, 190, 191, 193, 194,  
 195, 199, 211, 286  
 cerita 207, 209, 210, 211, 212, 213, 286  
 cermin masyarakat 206, 286  
 Chalen E. Westate 25  
 Charles Hoy 232, 287  
 Charles Sanders Peirce 215, 287  
 Choirul Mahfud 60  
 Christoper R. Ward 57, 67  
 Christopher Ward 93  
 Cikeusik 164, 287  
 clash civilization 8  
 Cletus R. Bulach 251, 287  
 conscience 19, 24  
 Copernicus 113  
 core values 236, 287

critical multicultural education 94  
 CSRC 167, 287  
 customer 231, 239, 287  
 Cyril Edwin Black 106

## D

Dadang S. Anshori 36  
 dakwah 161, 173, 175, 287  
 dampak positif 154, 242, 287  
 Danah Zohar 27  
 Darmaningtyas 33, 35, 43, 50, 53  
 Darmiyati Zuchdi 61  
 Darwin 110, 113  
 Darwis Sadir 65  
 Daulah Islamiyah 5  
 David R. Krathwohl 160, 180, 287  
 dayah 123, 129  
 decore 206, 287  
 dehumanisasi 132  
 dekadensi 161, 184, 253, 261, 287  
 demokrasi 162, 189, 221, 287  
 Demokrasi 3, 11, 14, 16, 18, 37, 53, 65,  
 67  
 demokratis 210, 219, 222, 223, 249, 251,  
 287  
 demokratisasi 5, 48, 51, 52  
 destruktif 161, 162, 287  
 dialektis-hermenutis 7  
 Dialog 14, 64  
 dialog 178, 218, 287  
 dialogis-persuasif 55, 62, 63  
 Dikotomi 98, 122, 130, 131, 136  
 dimensi waktu 206, 287  
 discipline 251, 287  
 doktrin Islam 222, 223, 287  
 doktrinal-normatif 7  
 dokumen 206, 287  
 domestifikasi 14  
 Doni Koesoema 187, 188, 189, 200, 250,  
 253, 261, 287  
 Dualisme 109, 121, 122, 123, 126, 136  
 duniawi 100

## E

Education 1, 13, 17, 19, 22, 30, 32, 57,  
 67, 69, 89, 94, 105, 122, 123, 133,  
 137

education 141, 159, 183, 185, 196, 203,  
 227, 242, 254, 267, 287  
 Edward Deming 230, 287  
 efektif 148, 152, 164, 203, 204, 222, 230,  
 232, 235, 237, 238, 239, 244, 245,  
 250, 287  
 ego 190, 194, 195, 199, 275, 287  
 egoistik 60  
 Eka Yani Erfina 37  
 Eko Prasetyo 61  
 eksistensialisme 27, 40  
 eksklusif 163, 178, 179, 211, 287  
 eksklusif 6, 7, 41, 42, 55, 56, 60, 62, 129  
 eksplorasi 222, 287  
 ekstrinsik 207, 214, 287  
 elemen cipta sastra 207, 211, 287  
 elitis 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 50,  
 51, 52  
 Elitis 39  
 Elitisme 37  
 Emil Salim 2  
 emosionalitas 61  
 empati 12, 93, 102  
 empirisme 20  
 enquiry 48  
 entertainment 90  
 entrepreneur 237, 287  
 Epistemologi 19, 25, 129, 130, 137, 114  
 esensial 146, 147, 287  
 esensialisme 40  
 esoteris 26  
 estetika 207, 287  
 estetis 61  
 ethnic studies movement 94  
 etika 8, 21, 24, 70, 96  
 etnik 58, 61, 97  
 etnisitas 10, 91  
 evolusi 113  
 Exegesis 287  
 expanding universe 117

## F

Fachry Ali 107, 109  
 falsafah 4, 107  
 fanatik 211, 212, 287  
 fanatisme 15, 60, 62, 92, 96, 98, 117  
 fardhu 'ain 21

fardhu kifayah 21  
 Fazlur Rahman 21, 23, 30, 129, 133, 137  
 Feeling the good 255, 287  
 feodalisme 49  
 Ferdinand de Saussure 287  
 figuratif 213, 287  
 fikih 6, 7, 64, 74  
 fikih siyasah 64  
 fiksi 206, 213, 287  
 filosofis 55, 62, 105, 111, 112, 114, 115  
 filosofis-paradigmatik 55  
 filsafat 240, 250, 275, 287  
 filsuf 183, 287  
 filsuf 21  
 fisik 142, 144, 146, 151, 162, 175, 179,  
 187, 193, 233, 236, 239, 252, 256,  
 271, 273, 287  
 fitrah 189, 287  
 fitrah 9, 118  
 fleksibel 148, 229, 239, 287  
 formalisme 220, 288  
 Foulkes 288  
 Francis Crick 113  
 Freud 110  
 Front Pembela Islam (FPI) 164, 288  
 fundamental 13, 23, 56  
 fundamentalisme 56, 92, 96, 113  
 fungsionalisme 37, 40

## G

gaib 113  
 Galileo Galilei 113  
 gaya 171, 207, 213, 214, 288  
 gender 47, 51, 52, 58  
 generasi Muslim 219, 222, 223, 288  
 George F. Kneller 13  
 George Ritzer 37  
 gereja 56  
 global 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 60,  
 93, 95  
 global village 6  
 globalisasi 1, 4, 10, 15, 39, 40, 90, 91, 98,  
 101, 102, 109, 110  
 global-universal 8  
 God of Love 8  
 God of Peace 8  
 God Spot 110

guru 142, 143, 144, 160, 165, 178, 179,  
 180, 204, 222, 223, 233, 234, 235,  
 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243,  
 256, 258, 288

## H

H. Soedijarto 32  
 H.A.R Tilaar 90, 92  
 Habibie 44  
 hadis 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148,  
 149, 150, 151, 155, 176, 288  
 hadis hukuman 150, 288  
 hadis tarbawi 288  
 hadist 162, 288  
 hak asasi manusia 215, 219, 220, 221, 223,  
 288  
 hand 29  
 Handayu 87  
 harb 175, 288  
 harkat 207, 288  
 Harun Nasution 117  
 Hasyim Asy'ari 125  
 head 29  
 heart 29  
 hedonisme 29  
 Herbert Gintis 39  
 Hermeneutika 23, 30  
 hermeneutis 13  
 Hidajat Nataatmadja 108  
 Hidayat 231, 245, 288  
 Holy War 159, 288  
 honesty 251, 288  
 Howard Gardner 61  
 hukum alam 100  
 humanis 207, 210, 219, 220, 221, 222,  
 223, 288  
 humanis 47, 55, 62, 63, 66, 89, 91, 101,  
 102  
 humanisme 1, 5  
 Humanis-religius 101

## I

'Ilm 115  
 'isyq 24, 134  
 IAIN 3, 9, 18, 119, 126, 135, 137  
 Ian G. Barbour 112  
 Ian Marshal 27

- Iblis 23  
 Ibn Bajjah 27  
 Ibn Bana' al-Marakusy 27  
 Ibn Sina 27  
 Ibn Tufail 27  
 Ibnu Khaldun 130  
 Ibnu Qayyim Al-Jauzi 116  
 Ibrahim 87  
 idealisasi 163, 288  
 ideologi 162, 167, 168, 181, 261, 288  
 ideologi 4, 5, 8, 11, 37, 61, 93, 121, 122  
 ideologi Barat 162, 288  
 Iif Khoiru Ahmadi 41  
 ijazah 21, 38  
 ikhlas 12  
 ilahiyyah 21  
 ilmu aljabar 27  
 Ilmu Optik 27  
 ilmuwan 2, 24, 133  
 Imam Chanafie Al-Jauhari 23  
 Imam Ghazali 233, 288  
 independen 288  
 independensi 112, 113, 128  
 India 20  
 individual 162, 165, 205, 206, 288  
 individualistik 60, 106  
 indoktrinasi 14, 72  
 Indonesia 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16,  
 17, 18, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34,  
 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 53,  
 54, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 70, 87,  
 88, 92, 95, 96, 97, 98, 103, 107,  
 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127,  
 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138,  
 147, 148  
 industri 90  
 inferior 46  
 informal 97  
 informasi 59, 70, 71, 90, 101, 127  
 inisiatif 190, 275, 288  
 inklusif 210, 211, 219, 220, 222, 223,  
 288  
 Inklusif 219  
 inklusif-multikultural 1, 15  
 inklusif-pluralis 55, 62  
 inklusivisme 1, 5, 63  
 Inklusivisme 177, 288  
 inkuisisi 93  
 inovatif 288  
 insaniah 101  
 insiden 207, 208, 209, 210, 211, 212,  
 288  
 instrumentalis 91  
 integratif 105, 108, 111, 113, 114, 115  
 intens pengarang 206, 288  
 International Crisis Group (ICG) 168,  
 288  
 International Standardization of Organisation  
 (ISO) 232, 288  
 intersubjektifisme 114  
 inthizhar 115  
 intrinsik 207, 211, 288  
 intuitif 192, 276, 288  
 IPA 110  
 IPTEK 109, 110, 132  
 Irfan S Awwas 168, 288  
 Isjoni 87  
 Islam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 45,  
 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61,  
 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74,  
 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85,  
 86, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 99, 100,  
 101, 103, 105, 107, 108, 109, 111,  
 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,  
 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,  
 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133,  
 134, 135, 136, 137, 138, 147, 148  
 Islam Transformatif 13, 16  
 Islamisasi 22, 127  
 istiqomah 145, 288  
**J**  
 J.A. Van der Chijs 124  
 Jajang Jahroni 4, 16  
 Jama'ah Anshoru Tauhid (JAT) 173, 288  
 Jamaah Islamiyah (JI) 168, 288  
 Jamal al-Banna 7  
 James Bank 58  
 Jan Van Luxemburg 206, 288  
 Jihad 159, 164, 168, 169, 173, 174, 175,  
 176, 177, 181, 288

- jihad 5, 116  
 jinayah 144, 288  
 Joan Dean 242, 288  
 Joseph M. Juran 288  
 Jubir Ibn Hayyan 27  
 Jujun 107, 109, 120  
 Jujun S. Suriasumantri 107, 109  
 juru catat 190, 191, 192, 193, 288  
 Jusuf Mudzakir 71, 74, 77
- K**
- Kafayeh Cipta Media (KCM) 168, 288  
 Kaffah 99  
 kafir 163, 166, 171, 212, 241  
 kafir 3, 62, 131  
 Kamboja 32  
 kapitalisme 49  
 karakter 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 198, 199, 210, 233, 234, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 277  
 Karel A. Steenbrink 123, 124  
 Karl Jaspers 107  
 Karl Marx 110  
 Karl May 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224  
 karya sastra 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215, 221  
 Katolik 113  
 Kauniah 99, 100  
 kearifan 2, 3, 4, 10, 15, 27, 108, 114  
 kebahagiaan 199, 233, 271, 277, 278  
 kebhinnekaan 2, 13  
 kebudayaan 13, 20, 43, 57, 60, 66, 79, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 125, 129  
 kecakapan hidup (life skill) 11  
 kecerdasan emosional 70  
 kecerdasan ganda 61  
 kecerdasan moral 70  
 kehidupan rohani 207  
 keimanan 10, 36, 55, 62, 64, 74, 84, 85, 113  
 kejiwaan 190, 206, 272  
 kekerasan 141, 142, 143, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 172, 173, 177, 203, 204, 205, 208, 214, 216, 217, 220, 222, 223, 249, 253, 268  
 kelembutan 151, 153, 154, 155, 157  
 kemampuan 144, 174, 175, 187, 188, 193, 204, 221, 222, 233, 234, 238, 239, 240, 244, 252, 254, 256, 257, 271, 272, 273, 274  
 kematangan usia 144  
 Kementerian Agama 122, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 122, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136  
 Ken Wilber 114  
 kepercayaan 229, 233, 242, 244  
 Kepple 113  
 kepribadian 142, 160, 183, 185, 187, 188, 194, 197, 248, 250, 252, 261, 270, 277  
 keragaman 210, 215, 220, 222, 223, 254, 258  
 Kerohanian Islam (Rohis) 167  
 kesadaran multikultural 215  
 kesetaraan 210, 215, 216, 220  
 ketidak-toleranan (l'intorelable) 93  
 Ketuntasan belajar (Mastery of learning) 77  
 kewarganegaraan 188, 260  
 khalifah 25, 64, 115  
 khauf 28  
 Khawarij 163  
 Ki Ageng Suryomentaram 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201  
 Ki Supriyoko 90, 93  
 kisah 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87  
 klasik 178, 204, 211  
 klorofil 117  
 Knowing the good 255  
 kognitif 11, 12, 24, 36, 61, 70, 72  
 kognitif 204  
 kohesi 213  
 kolonialisme 136  
 Komaruddin Hidayat 4, 7, 8, 24



komersialisasi 46  
 komite sekolah 228, 243  
 kompetensi intelektual 251  
 kompetensi personal 251, 252  
 kompetensi sosial 251  
 komposisi cerita 207, 212  
 konflik 161, 162, 163, 164, 165, 179, 204,  
 209, 237, 260, 275  
 konflik 2, 3, 8, 32, 44, 46, 47, 48, 50, 51,  
 52, 56, 57, 91, 98, 99, 112, 113  
 konservatif 7, 13  
 konstruktivis 91  
 kontak budaya 90, 91, 101  
 kontekstual 155, 174  
 kontekstual 55, 62, 63  
 konvensi masyarakat 206  
 konvensional 220, 275  
 kosmis 100, 101  
 kosmopolit 5, 6  
 kosmos 100, 101, 107  
 Kramadangsa 191, 194, 195, 199, 200  
 Krathwol 70  
 kreativitas pembaca 206  
 Kristen 3, 5, 9, 25, 100, 113, 124  
 Kristiani 210, 218, 219  
 kritis 217, 221, 222, 275  
 kritis-transformatif 48  
 kualitatif 144  
 kultur 3, 4, 64, 92, 93  
 kultural 43, 58, 61, 92, 93, 98, 114, 130,  
 135  
 Kuntowijoyo 11, 17, 28

## L

Lasykar Jihad 164  
 Latin 161, 205  
 learning to live together 92  
 Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian  
 (LaKIP) 160  
 Leo Sutrisno 14  
 liberalisme 162  
 liberalisme 7, 37  
 library research 189  
 lingkungan kebudayaan 206  
 link and match 111  
 lokal 2, 4, 15, 90, 95, 96, 101

## M

M. Agus Nuryatno 38, 40, 45, 47, 62,  
 134  
 M. Amin Abdullah 7, 11  
 M. Rizka Chamami 124, 130, 137  
 M. Syafi'i Anwar 11  
 M. Wahyuni Nafis 7, 8, 16  
 ma'lam 22  
 ma'nawiyah 26  
 Machali iv, 231, 245  
 Madani 65, 67  
 Madinah 3, 64, 65, 67  
 Madrasah 197, 227, 228, 232, 236, 237,  
 239, 242, 244, 246  
 Madrasah 22, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 42,  
 47, 53, 55, 89, 121, 123, 124, 125,  
 126, 127, 129, 132, 137  
 Madrasah Aliyah 55  
 Madrasah Ibtidaiyah 31, 89, 121, 132  
 Madrasah Insan Cendikia 34  
 Madrasah Pembangunan UIN Jakarta 34  
 Madura 56, 63  
 Mahmud Arif v, 1, 13  
 Mahmud Yunus 123, 126  
 Maimun 34, 35, 36, 37, 39, 53  
 mainstream 163, 164  
 Majelis Ar-Rayan 168  
 majemuk 2  
 makhluk berbudaya 207  
 Maksum 58, 67, 125, 126, 127, 137  
 malaikat 109, 116  
 Malaysia 32, 137  
 Malcolm Baldrige 232  
 Malik Fajar 92  
 Maluku 124  
 Mangun Budiyananto 75, 76  
 manhaj 154  
 martabat manusia 207  
 Marxian 46  
 Marxisme 110  
 Masa Keemasan 5  
 masjid 27, 56  
 Masngud 67  
 masyarakat 150, 160, 161, 162, 163, 165,  
 167, 176, 178, 179, 183, 184, 186,  
 205, 206, 221, 227, 228, 229, 234,

- 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243,  
244, 245, 247, 248, 251, 252, 254,  
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,  
262, 263, 268, 275, 286
- masyarakat madani (civil society) 95
- mata hati 154, 178
- materi pembelajaran 203, 204
- matrealisme 20
- Maurice Bucaille 117
- Meaning of Life 25
- media penyampaian 206
- memukul 142, 143, 144, 145, 146, 147,  
148, 149, 151, 155
- mencerdaskan 204, 249
- mendidik 141, 143, 144, 147, 149, 151,  
152, 153, 154, 155, 232
- mesin 107, 115
- Mesir 20
- metafora 215, 216, 219
- metode 142, 149, 151, 152, 160, 185,  
189, 190, 204, 211, 229, 230, 231,  
234, 261
- metode bercerita 211
- metode pendidikan 151
- MIN Malang I Jawa Timur 34
- Minahasa 124
- Miskel 232, 245
- mistis 20, 113
- mitos 28
- MMI 168
- modernisasi 4, 22, 39, 126
- Moh Dahlan 112
- monolitik 47, 61, 93
- moral 161, 183, 184, 185, 186, 187, 188,  
189, 207, 220, 249, 250, 248, 253,  
254, 251, 254, 255, 257, 258, 259,  
260, 261, 262, 263, 267, 275, 279,  
286
- moralitas 11, 12, 21, 56, 61, 100
- moralitas 175, 249, 254, 259
- motivasi 19, 24, 44, 78
- movere 206
- Mu'ad bin Jabal 116
- Muarif 122, 137
- muballig 123
- Mudjia Raharjo 42
- mufiti 21
- Muhaimin 61, 67
- Muhammad 143, 149, 152, 153, 154, 156,  
166, 168, 169, 171, 172, 185, 201,  
234, 245, 248, 256, 264, 286
- Muhammad 20, 22, 23, 25, 30, 64, 65,  
71, 77, 87, 88, 117, 120, 122, 125,  
131, 134, 137
- Muhammad Abduh 20, 117, 122
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi 71
- Muhammad Iqbal 134
- Muhammad Kholid Fathoni 125, 131
- Muhammad Quthb 77
- Muhammad Rasyid Ridha 22
- Muhammad Surya 25
- Muhammadiyah 164, 197, 201
- Mujiburrahman 9, 17
- Mukhlas 3
- multi-agama 64
- multi-etnis 64
- multi-kultur 64
- multikultural 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,  
89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
99, 101, 102, 103
- multikulturalisme 1, 62, 92, 95, 98
- multikulturalisme 221
- multikultural-religius 89, 91, 99, 101, 102
- Multiple Intelligence 237
- Mulyadhi Kartanegara 5, 130, 133
- mumayyiz 146
- Mun'im A. Sirry 6
- Muslih Usa 21, 30, 131, 132
- muslim 163, 164, 175, 178, 180, 197,  
263
- Muslim 3, 4, 5, 6, 9, 19, 21, 22, 24, 30,  
120, 126, 127
- muslim alamiah 100
- muslim insaniah 101
- Muslim paripurna 189
- muslim teologis 100
- Mutrofin 36
- mutu 185, 227, 228, 229, 230, 231, 232,  
235, 237, 238, 239, 240, 242, 243,  
245
- mutual agreement 100
- Myanmar 32

**N**

Nabi 3, 26, 64, 65, 75, 79  
 nahi munkar 160, 161  
 naluri 192  
 Nasihat bijak 206  
 nasionalis religious 122  
 nasionalis sekuler 122, 130, 135  
 nation state 5  
 Negara Pancasila 5, 16, 98  
 neoperennialisme 114  
 Newton 113  
 Ngainun Naim 32  
 Ngruki 168  
 Nicholson 117, 120  
 NII 165, 166, 167  
 nilai 160, 162, 175, 177, 179, 185, 186,  
 187, 188, 189, 194, 203, 204, 205,  
 215, 220, 221, 223, 231, 233, 234,  
 235, 236, 237, 238, 239, 240, 247,  
 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,  
 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,  
 263, 267, 274, 275, 278, 279  
 nilai perdamaian 203, 204, 220  
 NKRI 2, 3, 4  
 Noeng Muhajir 92  
 non Muslim 4, 6  
 non-empiris 20  
 non-pribumi 98  
 normatif 189, 220, 253  
 normatif-dogmatis 220  
 novel 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211,  
 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219,  
 220, 221, 222, 223  
 novelis 215, 217, 220  
 NTB 164  
 NTB 63  
 NU 164  
 Nur Achmad 59  
 Nurcholish Madjid 2, 5, 6, 8, 10, 12, 65  
 Nursisto 56, 67  
 Nusantara 204, 247

**O**

objektifisme 114  
 Orde Baru 2, 4, 9  
 others 178, 179, 251

**P**

pancaindra 191, 192, 193  
 Pancasila 249, 253, 256, 257, 258, 259,  
 260, 261, 262, 263, 264, 267  
 Pancasila 4, 5, 10, 11, 16, 98  
 Papua 56  
 Pardjono 87  
 particular 121  
 partisipasi 228, 241, 242, 244, 245  
 Parung 164  
 Paulo Freire 48, 58  
 pedagogik dialogis 13  
 pedagogik komunikatif 13  
 Pedagogik Transformatif 13, 18, 58, 67  
 pedagogy empowerment 96  
 pedagogy of equity 96  
 pemaknaan 205  
 pembaharuan 161, 203, 204, 230  
 pencerahan 154, 155, 178, 215  
 pencucian otak 165  
 pendekatan sejarah 218, 219  
 pendidik 143, 154, 155, 220, 221, 228,  
 242, 251, 254, 261, 263  
 pendidikan 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
 15, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31,  
 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71,  
 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83,  
 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94,  
 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,  
 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,  
 112, 115, 118, 121, 122, 123, 124,  
 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,  
 132, 133, 134, 135, 136, 147  
 pendidikan 141, 142, 143, 144, 146, 147,  
 148, 149, 151, 154, 159, 160, 161,  
 176, 178, 179, 181, 183, 184, 185,  
 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197,  
 198, 199, 203, 204, 206, 219, 220,  
 221, 222, 223, 225, 227, 228, 229,  
 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237,  
 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,  
 245, 249, 250, 251, 253, 254, 255,  
 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,

- 263, 267, 268, 278, 279
- Pendidikan agama 11, 14, 15, 60, 73, 99
- pendidikan agama 159, 178, 220, 235, 260, 261
- Pendidikan Agama Islam 1, 12, 55, 57, 58, 64, 67, 69, 72, 73, 83, 87, 105
- pendidikan elitis 31, 37, 38, 47, 51, 52
- pendidikan Islam 142, 151, 154, 185, 186, 189, 203, 204, 206, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 255, 256, 262, 278, 279
- pendidikan karakter 184, 185, 186, 188, 189, 190, 196, 198, 199, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 267
- pendidikan kritis 48, 51, 52
- pendidikan multikultural 2, 9, 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102
- Pendidikan Nasional 10, 14, 17, 18, 25, 30, 32, 49, 54, 78, 86, 87, 90, 92, 95, 103, 122, 125, 126, 131, 136, 137, 111
- Pendidikan religiusitas 10
- Pendidikan Satu Atap 121, 133
- penelitian kepustakaan 189
- pengajaran 143, 154, 179, 220
- penokohan 207, 210, 211, 218
- penyampai agama 204
- peradaban 21, 27, 66, 90, 112, 116, 134
- perasaan 147, 183, 193, 205, 275, 279
- perawi 148
- perdamaian 177, 180, 203, 204, 205, 210, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223
- Perennial 7, 8, 16
- Perennialis 27
- pergerakan moral 185
- perspektif iv, 159, 219, 279
- pertanian 90
- pesantren 56, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131
- Pesantren Tebu Ireng 95
- peserta didik 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 108, 128, 136
- Philip B. Crosby 229
- Philipina 32
- Piagam Madinah 65, 67
- pilihan kata 213
- plot 207, 209, 210, 211
- plural 2, 8, 11, 92, 97
- pluralisme 179, 221, 248, 258, 262
- pluralisme 7, 55, 56, 62, 65, 92, 93, 95, 97
- pluralitas 179, 262, 263
- pluralitas 7, 13, 57, 59, 60, 61, 64, 92, 99
- point of view 211
- pondok 56, 123, 125, 129
- Pondok Pesantren al-Mukmin 168
- positivisme 20
- positivistik 131
- posmodernisme 114
- Poso 56
- Prasetya Irawan 108
- pribumi 98, 124
- primordialis 91
- primordialistik 2
- prinsip-prinsip demokrasi 221
- productive force 31, 47, 51, 52
- produk budaya 206
- profetik 28
- Programme of International Student Assessment (PISA) 32
- property 251
- prosa 205, 213
- provinsialisme 2, 4
- Prudence Crandall 57
- pseudoilmiah 131
- psikis 142, 144, 150, 151, 234, 271, 274
- psikologis 154, 233, 252, 271, 275, 276, 279
- psikologis 8, 12, 75, 84
- psikomotorik 204
- psikomotorik 34, 36, 61, 71, 72
- puisi 205
- Q**
- qadi 21

qauliyah 23  
 qital 174, 175  
 quantum learning 237  
 quantum teaching 237  
 Qur'aniah 99, 100  
 Quraish Shihab 22, 115, 118, 120

## R

rabbaniyyat 19, 24  
 radicalism 159  
 radikal 160, 161, 163, 165, 167, 168, 171, 179, 180  
 radikal 6, 7, 49, 51, 52  
 radikalisme 159, 160, 161, 162, 165, 167, 168, 174, 179, 180, 257  
 radikalisme 4, 15, 56  
 radix 161  
 Raihani 41, 54  
 Rangawarsita 248  
 ras 5, 47, 51, 52, 58, 91, 92, 100, 101, 102  
 rasa 154, 161, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 205, 213, 228, 230, 237, 239, 253, 255, 272  
 rasionalisme 20, 21, 57, 60, 108, 111  
 rasionalisme-intelektual 21  
 rasionalitas 28, 61, 117  
 Rasulullah 144, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 175, 176, 177, 180  
 realitas 162, 206, 207, 214, 223, 236, 248  
 refleksi 207  
 reinventing 249  
 rekonstruksi 203  
 relativism moral 257, 258, 263  
 relevansi 186, 206  
 religious pluralism 8  
 religius 24, 59, 89, 91, 99, 101, 102, 105, 106, 113, 118, 127  
 reproductive force 31, 47, 51, 52  
 respect for self 251  
 reward 43  
 reward and punishment 149  
 Richard Dawkins 113  
 riwayat mauquf 148  
 Robert Setio 3  
 RSBI 35, 41, 42, 51  
 Rubaidi 162, 180

ruhaniyyah 25

## S

S. Nasution 43  
 Sains 20, 21, 107, 112, 113, 117, 119, 120, 131  
 Sains agama 21  
 Sains rasional 21  
 sains tradisional 21  
 Salafi 163  
 Salafi 4, 16  
 santrinisasi 39  
 SARA 203, 268  
 sastra 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215, 221, 222, 224, 287  
 sastra 28  
 Saussure 216, 287  
 Sayyed Ahmad Khan 20  
 schooling 97  
 science 19, 24, 113  
 SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta 34  
 SD Sabili Malang 34  
 SDIBI (Sekolah Dasar Islam Berstandar Internasional) 34  
 sejarah 151, 163, 178, 185, 203, 204, 206, 211, 218, 219, 233, 253, 254, 262  
 sejarah 8, 23, 28, 45, 49, 65, 74, 79, 94, 121, 122, 127, 130, 132, 133, 134  
 sejarah mentalitas 206  
 sekolah 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 111, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134  
 Sekolah Berstandar Internasional (SBI) 40, 41, 53  
 Sekolah Berstandar Nasional (SSN) 40, 41, 53  
 Sekolah Dasar Islam Terpadu 72, 73, 84  
 sektarianisme 2, 4  
 sekte 162  
 sekularisme 162, 254, 260  
 sekulerisme 7, 21  
 self-control 251  
 semesta 5, 12, 23, 24, 25, 45, 118, 131,

- 132, 133, 134  
 Semiotika 225, 226  
 seni 187, 205, 206, 212, 241, 256  
 seni kreatif 206  
 sensualisme 20  
 Serat Kalatida 248  
 shahih 143, 145  
 shalat 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,  
 148, 149, 151, 154, 155, 208, 209  
 signifier 208, 210, 211, 216  
 signifikansi 219  
 silent majority 5  
 simpati 154, 179  
 simpati 93, 102  
 Sindhunata 37, 53  
 Singapore Quality Award 232  
 Single group studies 93  
 sistem pemikiran 206  
 sistem pendidikan 2, 22, 33, 36, 48, 71,  
 89, 91, 99, 107, 108, 109, 111, 121,  
 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129,  
 130, 131, 132, 134, 136  
 sistem pengetahuan 206  
 Six Sigma 232  
 Sleeter dan Grant 93  
 SMP 40, 41, 42, 131  
 SMU 42, 131  
 Sobri 41, 42, 44, 54  
 social capital 236, 237  
 Soeroyo 131  
 Sofan Amri 41, 53  
 Solo 168, 171, 172, 204, 226, 268  
 sosial budaya 206  
 sosial-budaya 2, 13, 92, 96, 98  
 sosialitas 61  
 sosial-keagamaan 5, 6  
 spiritualitas 27, 107  
 stakeholders 228, 231  
 Standar isi 228  
 Standar kompetensi lulusan 228  
 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 42  
 Standar pembiayaan 228  
 Standar pendidik dan tenaga kependidikan  
 228  
 Standar pengelolaan 228  
 Standar penilaian pendidikan 228
- Standar proses 228  
 Standar sarana dan prasarana 228  
 Stephen Hawking 113  
 Steven Pinker 113  
 strata sosial 58  
 struktur kalimat 213  
 struktur mental 205  
 struktur nilai 106  
 stupidifikasi 14  
 subjektifitasme 114  
 substantif 55, 62, 63  
 sudut pandang 211, 212, 250  
 Sufi 26, 28  
 Suhardjono 86  
 Suhrawardi 27  
 Sulawesi 124  
 Sunan Kalijaga iv, 159, 180, 183, 201, 204,  
 225  
 sunnatullah 26, 99, 102  
 Supardi 86  
 superior 42, 46  
 supralogis 20  
 Surakarta 184, 200, 201, 248  
 surau 123, 129  
 Susilo Bambang Yudhoyono 95  
 Sutrisno 14, 17, 129, 137  
 Suyanto 14, 17, 70, 88  
 swasta 33, 35, 41, 43, 45, 50, 128  
 sweeping 160, 161  
 Syamsul Arifin 108  
 syari'ah 164  
 Syed Ali Asyraf 22, 30  
 Syed S. Hussain 22, 30  
 Syiah 56, 63  
 Syuaeb 87  
 syukur 12
- T**  
 tafaqquh fi al-din 256  
 Tamyiz Burhanudin 86  
 tarbiyah 196, 197, 256  
 tarbiyatul khuluq 256  
 Tarmizi Taher 9, 10  
 tasawuf 26  
 tauhid 28, 100, 132  
 tawakkal 28  
 technique 211

- Teguh Triwiyanto 41, 42, 44  
 teknik cerita 207, 211  
 teknologi 20, 21, 40, 59, 90, 101, 106,  
 107, 110, 114, 115, 118, 127, 128,  
 132, 135  
 teknologi informasi 90  
 Teks 143, 206, 224  
 temperamen 211  
 teologi 21, 26, 55, 56, 62, 93  
 teori pendidikan kontemporer 149  
 terorisme 6, 56  
 Thaha Jabir al-Ulwani 7  
 Thomas J La Belle 57  
 Thomas Lickona 250, 251, 254, 255, 260  
 Timur Tengah 162, 168  
 Tirmidi 116  
 titik pandang 211  
 toleran 177, 179, 211, 220  
 toleran 3, 9, 55, 62, 63, 64  
 toleransi 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 56, 58, 65,  
 66, 92  
 Toto Suharto 90  
 TQM 229, 232  
 tradisi 6, 10, 13, 21, 25, 26, 27, 59, 61, 92,  
 98, 110, 124, 127, 130  
 tradisional 114  
 transfer of knowledge 237  
 transfer of values 237  
 transformasi 220, 230, 239, 247  
 transformatif 13, 48, 105  
 trans-individual 205  
 transnasional 5  
 Triwiyanto 41, 42, 44, 54  
 true story 213  
 truth claim 7
- U**
- 'ulum naqliyyah 21  
 'ulum syari'ah 21  
 UIN iv, 1, 3, 22, 31, 34, 42, 53, 54, 89,  
 90, 92, 99, 103, 119, 126, 127, 134,  
 135, 137, 148  
 ulama 142, 143, 146, 174, 190, 235  
 umroh 3  
 UNESCO-OECD 32
- universal 1, 5, 7, 8, 11, 28, 56, 63, 107,  
 109, 114  
 universe 90, 117  
 unsur estetik 206  
 Ushul Fikih 143  
 UU Sisdiknas 2003 98  
 UUD 1945 36, 98
- V**
- Vietnam 32  
 view point 211
- W**
- Wahabiyah 163  
 Wan Mohd Nor Wan Daud 23  
 watak 190, 204, 210, 211, 249, 250  
 Wayan Lasmawan 251  
 wayang 205  
 Weltanschauung 95  
 Will Kymlicka 262  
 William Kymlika 257  
 Wina Sanjaya 70
- X**
- xenophobia 92, 96
- Y**
- Yahudi 3, 100  
 Yudian Wahyudi 99  
 Yunani 205, 250, 271  
 Yusuf al-Qardhawi 147
- Z**
- Zaenul Fitri 34, 35, 36, 37, 39, 53  
 Zainal Abidin Bagir 111, 119  
 Zainal Aqib 40, 41  
 Zainuddin Labay el-Yunusi 125  
 Zainuddin Maliki 42, 43, 44, 46, 47, 48  
 Zakiah 86  
 Zakiyuddin Baidhawiy 3  
 Zamroni 3, 11, 14, 18  
 zending 124  
 Ziauddin Sardar 120  
 Zuhairi Misrawi 177, 178, 181  
 Zuhairi Misrawi 6, 7, 16  
 Zuhairini 122, 138

## INDEKS PENULIS

No	Penulis	Judul	Hlm
1	Mahmud Arif	Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural	1-18
2	Imam Hanafi	Basis Epistemologi dalam Pendidikan Islam	19-30
3	Andi Prastowo	Fenomena Pendidikan Elitis dalam Sekolah/Madrasah Unggulan Berstandar Internasional	31-54
4	Erlan Muliadi	Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah	55-68
5	Pandi Kuswoyo	Ketuntasan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Melalui metode Kisah	69-88
6	Zainal Arifin	Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius	89-104
7	Ibnu Rusydi	Paradigma Pendidikan Agama Integratif Transformatif	105-120
8	Suyatno	Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional	121-138
9	Ali Imron	Re-interpretasi Hadis Tarbawi Tentang Kebolehan Memukul Anak Didik	141-150
10	Abdul Munip	Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah	159-182
11	Sumedi	Tahap-Tahap Pendidikan Karakter dalam Pemikiran Ki Ageng Suryomentaram dan Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak Islam	183-202
12	Indriyani Ma'rifah	Perspektif Pendidikan Islam dalam Novel <i>Dan Damai di Bumi!</i> Karya Karl May	203-226



No	Penulis	Judul	Hlm
13	K.A.Rahman	Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat	227-246
14	Mukhibat	Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter	247-266
15	Suyadi	Logoterapi, Sebuah Upaya Pengembangan Spiritualitas dan Makna Hidup dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam	267-280

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada mitra bebestari yang telah berkenan *review* naskah-naskah Jurnal Pendidikan Islam Volume I, Nomor 1 dan 2, tahun 2012 sehingga bisa terbit. Mereka adalah:

1. Prof. Dr. H. Abdul Munir Mulhan SU (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
2. M. Agus Nuryatno, MA, Ph.D (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
3. Dr. Mahmud Arif, M.Ag (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
4. Prof. Dr. Saedah Siraj (Faculty of Education University of Malaya, Malaysia)
5. Dr. Zawawi Ismail (Faculty of Education University of Malaya, Malaysia)
6. Dr. Hujair AH Sanaky, M. Si (Magister Studi Islam UII Yogyakarta)

## **PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL PENDIDIKAN ISLAM (JPI) FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Naskah-naskah yang dikirimkan ke redaksi Jurnal Pendidikan Islam (JPI) akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian dan pengembangan pendidikan Islam, gagasan orisinal, ringkasan hasil penelitian/survei, atau bentuk tulisan lainnya yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan studi dan pemikiran pendidikan Islam
2. Naskah yang dikirim merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris/Arab) yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia atau asing (Inggris/Arab) yang baik dan benar.
4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, identitas penulis (lembaga dan e-mail penulis), abstrak, kata kunci, isi, dan rujukan.
5. Judul harus ringkas, spesifik dan efektif, tidak melebihi 12 kata yang menggunakan Bahasa Indonesia, 10 kata yang menggunakan Bahasa Inggris.
6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata dengan memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kesimpulan.
7. Kata kunci maksimal 4 kata yang mencerminkan isi naskah.
8. Isi naskah terdiri dari 5000 s.d. 6000 kata atau 20 s.d. 25 halaman kertas ukuran kuarto diketik dengan spasi satu setengah.
9. Naskah ditulis dengan menggunakan *footnote* (catatan kaki) yang memuat nama penulis, judul buku/majalah/jurnal diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan, dan halaman.
10. Rujukan disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, judul buku/jurnal/majalah diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun terbit.
11. Naskah diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan format RTF (Rich Text Format) atau Doc. (Word Document) dikirim langsung ke redaksi atau melalui e-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id dengan menggunakan *attachment file*.

12. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tanpa mengubah isinya.
13. Setiap naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan dalam tiga kriteria: diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau ditolak.
14. Naskah yang dimuat akan diberitahukan kepada penulis via e-mail.
15. Naskah yang dimuat akan diberi apresiasi dan mendapatkan *Jurnal Pendidikan Islam*.

**Jurnal Pendidikan Islam (JPI)**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. III Ruang 315

UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Telp. +62-274-513056

E-mail: [jurnaljpi@yahoo.co.id](mailto:jurnaljpi@yahoo.co.id)